

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan adalah suatu usaha untuk melakukan perubahan terhadap keadaan yang lebih baik. Usaha pembangunan didasarkan pada proses pelaksanaan pembangunan, dimana pelaksanaan pembangunan itu terjadi pembaharuan segala bidang kehidupan, baik perubahan yang bersumber dari pergeseran nilai, gagasan, keyakinan dan sebagainya. Proses pelaksanaan pembangunan harus berpatokan pada pembangunan nasional.

Pembangunan nasional merupakan pembangunan manusia seutuhnya dan seluruh rakyat Indonesia. Pembangunan itu bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil, makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pembangunan ini merupakan rangkaian upaya perbaikan dan peningkatan taraf kehidupan berbangsa dan negara yang dilaksanakan secara berkesinambungan. Dari pembangunan itu, telah banyak membuahkan hasil bagi kehidupan penduduk, namun masih belum merata di berbagai bidang termasuk dalam sektor fasilitas sosial ekonomi.

Kualitas kehidupan yang lebih baik memang mensyaratkan adanya pendapatan yang tinggi. Namun pendapatan bukanlah satu-satunya ukuran kesejahteraan. Hal lain yang tidak kalah penting yang perlu diperjuangkan adalah masalah pendidikan, ekonomi dan kesehatan (Sugiharto, 2007). Mengukur keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya menggunakan tolok ukur ekonomi saja melainkan juga harus didukung oleh indikator-indikator sosial (non

ekonomi), antara lain seperti tingkat buta huruf, tingkat pendidikan, dan kualitas pelayanan kesehatan, kecukupan akan kebutuhan perumahan.

Bertambahnya penduduk dari tahun ketahun juga akan berpengaruh terhadap perkembangan pembangunan suatu bangsa. Jumlah penduduk yang besar memerlukan berbagai fasilitas pelayanan baik sosial maupun ekonomi dalam mengembangkan potensi yang ada pada diri seseorang. Dengan demikian pembangunan itu telah memberikan hasil bagi kehidupan penduduk, tetapi pembangunan itu belum merata di berbagai bidang termasuk dalam sektor fasilitas sosial.

Banyak faktor yang mempengaruhi belum meratanya pembangunan, di antaranya (1) kurangnya partisipasi masyarakat akibat kurangnya kerja sama, (2) selama ini pola perencanaan pembangunan mengartikan makna partisipasi sebagai dukungan rakyat terhadap rencana/proyek pembangunan yang dirancang dan ditentukan tujuannya, (3) kurangnya kesiapan masyarakat atau sumber daya manusia padahal sumber daya alam jumlahnya relatif besar, hal itu memerlukan pengelolaan yang lebih intensif agar mampu memiliki produktifitas yang tinggi (Junaedi, 1999).

Upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah yang terjadi adalah melaksanakan pembangunan secara desentralisasi artinya bahwa setiap daerah diberi wewenang untuk mematuhi dan melaksanakan pembangunan sesuai dengan kepentingan daerahnya. Oleh sebab itu pemerintah daerah lebih kreatif dan produktif sehingga mendorong terwujudnya pemerataan hasil-hasil pembangunan. Disamping itu, sistem desentralisasi akan mengurangi masalah-masalah demokratis seperti lebih meratanya kepadatan penduduk, berkurangnya

arus migrasi dan sebagainya. Selain itu, pemerintah telah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut serta dalam proses pembangunan dengan mendapatkan kesempatan yang sama menikmati hasil pembangunan sesuai dengan kemampuannya. Syarat dari keikutsertaan yaitu seluruh anggota masyarakat selain peluang dan akses yang sama juga meliputi kemampuan kerjasama antara rakyat dengan pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan, menjaga, melestarikan hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai namun hasilnya belum sesuai dengan harapan (Sutrisno, 2000).

Keadaan tersebut tidak terlepas dari penduduk di Indonesia yang masih memiliki jumlah yang besar, ini ditunjukkan data penduduknya pada tahun 2010 berjumlah 237.641.329 jiwa (Badan Pusat Statistik, 2010). Pertambahan penduduk menuntut adanya pertambahan fasilitas. Jumlah penduduk yang menggunakan pelayanan mencerminkan keinginan dan kepuasan terhadap suatu pelayanan. Makin tinggi tingkat kepadatan pelayanan berarti terdapat kecenderungan untuk menambah fasilitas pelayanan agar mampu melayani peningkatan permintaan pada masa depan, sebagai akibat dari bertambahnya jumlah penduduk.

Seiring dengan perjalanan waktu kewaktu, pada umumnya kota Provinsi dan Kabupaten/Kota mengalami pertambahan penduduk. Dengan demikian bertambahnya jumlah penduduk haruslah diimbangi dengan bertambahnya fasilitas. Keadaan ini juga terjadi pada fasilitas pelayanan sosial yang mencakup fasilitas pelayanan pendidikan (TK, SD, SLTP, SLTA), kesehatan (puskesmas, puskesmas pembantu, balai pengobatan, BKIA dan rumah sakit bersalin, praktek dokter, apotek, rasio dokter, bidan, perawat), air bersih (PAM, air sumur),

perumahan (perumahan permanen, semi permanen, tidak permanen, bukan tempat tinggal), sanitasi (pembuangan sampah, pembuangan air limbah, jenis jamban, pemilikan jamban), kesenian dan kepariwisataan (anggota kesenian, hotel, losmen), keagamaan (mesjid, gereja, vihara), olahraga (lapangan sepak bola, bola voly dan bulu tangkis), serta pelayanan keamanan (Muta'ali, 2000). Apabila fasilitas yang tersedia sudah dapat mencukupi kebutuhan penduduk maka dapat dikatakan penduduk dapat memenuhi kebutuhannya. Ketersediaan fasilitas pelayanan itu di setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota berbeda termasuk di Kabupaten Deli Serdang mengalami masalah yang sama.

Kecamatan Pagar Merbau merupakan bagian dari Kabupaten Deli Serdang. Jumlah penduduk menurut BPS pada tahun 2010 sebesar 29.883 jiwa dan tahun pada tahun 2014 berjumlah 37.921 jiwa (BPS Deli Serdang dalam angka 2014) yang tersebar di 16 desa dengan luas wilayah 6.289 Ha (62,89 Km²). Pertambahan penduduk terlihat sebanyak 8.038 jiwa, tetapi luas wilayah tidak bertambah. Dan dengan hal itu setiap penduduk membutuhkan fasilitas pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun dengan adanya pertambahan penduduk yang tidak diimbangi dengan pertambahan fasilitas pelayanan sosial maka terjadi ketimpangan antara jumlah penduduk dengan fasilitas pelayanan sosial yang tersedia. Kemudian dengan hal itu sering juga ditemukan bahwa fasilitas pelayanan sosial dikatakan tersedia tetapi belum mencukupi bagi kebutuhan penduduknya untuk meningkatkan taraf hidupnya.

Keadaan ini terlihat pada fasilitas pelayanan pendidikan, di Kecamatan Pagar Merbau masalah yang paling umum adalah penyediaan fasilitas pendidikan yang masih minim atau kurang memadai, sebagai contoh jumlah sekolah yang

tidak seimbang dengan jumlah penduduk yang ada di Kecamatan Pagar Merbau, dan dapat dilihat jumlah sekolah yang ada di Kecamatan Pagar Merbau memang tersedia akan tetapi tidak mencukupi, yang menyebabkan penduduk sulit dalam memenuhi kebutuhan pendidikan, dan harus mencari sekolah ke luar dari kecamatan tersebut yaitu ke kecamatan lain bahkan ada yang harus ke kabupaten lain, tentunya hal itu tidak mudah. Di Kecamatan Pagar Merbau terdapat sekolah tingkatan SLTP berjumlah 5 sekolah yaitu 1 sekolah negeri dan 4 sekolah swasta, sekolah tingkatan SLTA berjumlah 1 sekolah yaitu sekolah swasta dimana tidak terdapat sekolah SLTA negeri. Menurut Muta'ali tentang fasilitas pendidikan dimana setiap 4.800 penduduk harus dibangun 1 unit sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) dan setiap 4.800 penduduk harus dibangun 1 unit sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA), tetapi di Kecamatan Pagar Merbau belum terlaksana. Kecamatan Pagar Merbau yang memiliki jumlah penduduk 37.921 jiwa pada tahun 2014 maka seharusnya tersedia 7 unit untuk Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan 7 unit Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, namun kenyataannya hanya tersedia 5 unit sekolah SLTP dan 1 unit sekolah SLTA serta masih rendahnya mutu pelayanan pendidikan pada pelayanan jumlah sekolah, ruang kelas, guru dan murid pada tingkat SD, SLTP, dan SLTA. Keterbatasan ini juga terjadi pada fasilitas pelayanan sosial yang lain seperti kesehatan (puskesmas, puskesmas pembantu, balai pengobatan, BKIA dan rumah sakit bersalin, praktek dokter, apotek, rasio dokter, bidan, perawat), air bersih (PAM, air sumur), perumahan (perumahan permanen, semi permanen, tidak permanen, bukan tempat tinggal), sanitasi (pembuangan sampah, pembuangan air limbah, jenis jamban, pemilikan jamban), kesenian dan kepariwisataan (anggota kesenian, hotel,

losmen), keagamaan (mesjid, gereja, dan vihara), olahraga (lapangan sepak bola, bola voley dan bulu tangkis), serta pelayanan keamanan. Berhubungan dengan masalah ini, maka perlu dikaji ketersediaan dan kesesuaian fasilitas pelayanan sosial di Kecamatan Pagar Merbau Kabupaten Deli Serdang.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang dikemukakan, maka yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah adanya ketimpangan jumlah penduduk yang tidak seimbang dengan ketersediaan fasilitas pelayanan sosial yang mencakup fasilitas pelayanan pendidikan (SD, SLTP, SLTA), kesehatan (puskesmas, puskesmas pembantu, balai pengobatan, BKIA dan rumah sakit bersalin, praktek dokter, apotek, rasio dokter, bidan, perawat), air bersih (PAM, air sumur), perumahan (perumahan permanen, semi permanen, tidak permanen, bukan tempat tinggal), sanitasi (pembuangan sampah, pembuangan air limbah, jenis jamban, pemilikan jamban), kesenian dan kepariwisataan (anggota kesenian, hotel, losmen), keagamaan (mesjid, gereja, dan vihara), olahraga (lapangan sepak bola, bola voley dan bulu tangkis), serta pelayanan keamanan di Kecamatan Pagar Merbau Kabupaten Deli Serdang.

C. Pembatasan Masalah

Melihat luasnya cakupan masalah yang ada dalam penelitian yang telah diuraikan sebelumnya pada latar belakang masalah dan identifikasi masalah, agar masalah dalam penelitian ini menjadi jelas/terarah, dan terfokus maka masalah dalam penelitian ini dibatasi dalam fasilitas pendidikan pada tingkat (SD, SLTP

dan SLTA), fasilitas kesehatan meliputi (puskesmas, puskesmas pembantu, balai pengobatan, BKIA dan rumah sakit bersalin, apotek, rasio dokter, bidan dan perawat), fasilitas keagamaan (mesjid, gereja, vihara), dan fasilitas olahraga meliputi lapangan sepak bola, bola voly dan bulu tangkis di Kecamatan Pagar Merbau Kabupaten Deli Serdang.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana ketersediaan fasilitas pelayanan sosial (fasilitas pendidikan, kesehatan, keagamaan dan fasilitas olahraga) di Kecamatan Pagar Merbau?
2. Bagaimana kesesuaian antara jumlah fasilitas pelayanan sosial (fasilitas pendidikan, kesehatan, keagamaan, dan fasilitas olahraga) yang tersedia dengan jumlah penduduk di Kecamatan Pagar Merbau?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui ketersediaan fasilitas pelayanan sosial (fasilitas pendidikan, kesehatan, keagamaan dan fasilitas olahraga) di Kecamatan Pagar Merbau.

2. Untuk mengetahui kesesuaian antara jumlah fasilitas pelayanan sosial (fasilitas pendidikan, kesehatan, keagamaan dan fasilitas olahraga) yang tersedia dengan jumlah penduduk di Kecamatan Pagar Merbau.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Sebagai sumbangan pemikiran dan sumber ilmu pengetahuan, khususnya di bidang geografi.
2. Bahan informasi atau masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang khususnya Pemerintah Kecamatan Pagar Merbau dalam mengambil kebijakan untuk membuat program pembangunan disektor fasilitas pelayanan sosial.
3. Menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis untuk menyusun karya ilmiah dalam bentuk skripsi.
4. Bahan referensi atau bahan perbandingan bagi peneliti lainnya dalam objek yang sama pada lokasi dan waktu yang berbeda.